

Rekonstruksi Pasca-Konflik di Gaza: Menuju Perdamaian Berkelanjutan melalui Pendekatan Foresight

Miftahul Ulum^{1,*}

¹Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419

* miftahul.ulum@umj.ac.id

ABSTRAK

Studi ini mengeksplorasi kompleksitas rekonstruksi pasca-konflik di Gaza melalui pendekatan foresight dan lensa konstruktivisme, dengan fokus pada tantangan utama Deklarasi Mesir 2025. Penelitian mengidentifikasi hambatan seperti kebuntuan politik antara Hamas dan Otoritas Palestina, penolakan Israel, ketidakpastian pendanaan, serta risiko politisasi oleh aktor eksternal. Meskipun lebih inklusif dibandingkan kesepakatan sebelumnya, Deklarasi Mesir belum mampu menyelesaikan akar masalah fragmentasi politik dan tata kelola keamanan. Analisis foresight mengungkap tiga skenario potensial: perdamaian berkelanjutan, konflik siklis, atau stabilitas parsial dengan pembangunan terbatas. Studi ini juga menyoroti peran strategis aktor non-negara seperti Muhammadiyah dalam mendukung rekonstruksi melalui bantuan kemanusiaan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan institusi. Kesimpulannya, rekonstruksi Gaza memerlukan pendekatan multidimensi yang menggabungkan tata kelola inklusif, kemandirian ekonomi, dan inovasi teknologi, dengan peran kritis aktor transnasional berbasis nilai dan pengetahuan seperti Muhammadiyah untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kata kunci: Rekonstruksi Gaza, Deklarasi Mesir 2025, Muhammadiyah, Foresight, Perdamaian Berkelanjutan

ABSTRACT

This study examines the complexities of post-conflict reconstruction in Gaza through a foresight approach and constructivist lens, focusing on the challenges of the Egypt Declaration 2025. The research identifies key obstacles, including political deadlock between Hamas and the Palestinian Authority, Israel's rejection, funding uncertainties, and risks of external politicization. Despite being more inclusive than previous agreements, the Egypt Declaration fails to address root issues of political fragmentation and security governance. Foresight analysis reveals three potential scenarios: sustainable peace, cyclical conflict, or partial stability with limited development. The study also highlights the strategic role of non-state actors like Muhammadiyah in supporting reconstruction through humanitarian aid, education, economic empowerment, and institutional strengthening. The conclusion emphasizes that Gaza's reconstruction requires a multidimensional approach integrating inclusive governance, economic self-sufficiency, and technological innovation, with critical contributions from value- and knowledge-based transnational actors like Muhammadiyah to foster sustainable and equitable peace.

Keywords: Gaza Reconstruction, Egypt Declaration 2025, Muhammadiyah, Foresight, Sustainable Peace

1. PENDAHULUAN

Gaza, salah satu wilayah terpadat di dunia, tetap terjebak dalam siklus kehancuran dan rekonstruksi yang seolah tak berujung. Setiap gelombang konflik meninggalkan luka yang lebih dalam pada infrastruktur dan masyarakat Gaza, sementara upaya rekonstruksi sebelumnya, yaitu pasca-Perang 2014, gagal menciptakan perdamaian atau pembangunan berkelanjutan (Besaiso, 2024; UNOPS, 2024). Meskipun miliaran dolar bantuan internasional mengalir, "krisis abadi" Gaza terus berlanjut, dipicu oleh blokade Israel yang masih berlangsung, fragmentasi politik internal Palestina, serta ketergantungan pada bantuan luar negeri yang justru mengukuhkan status quo (Besaiso, 2025; Brookings, 2024).

Skala kehancuran sungguh mencengangkan: sebagian besar infrastruktur Gaza, termasuk rumah, bangunan komersial, dan layanan vital, telah hancur atau tidak dapat difungsikan (Al Jazeera, 2025; UNOPS, 2024). Blokade membatasi ketat masuknya material konstruksi, makanan, dan obat-obatan, memperburuk kondisi kemanusiaan dan mempersulit rekonstruksi (UNOPS, 2024; Salaam Gateway, 2024). Perpecahan politik antara Hamas di Gaza dan Otoritas Palestina di Tepi Barat semakin melemahkan koordinasi dan tata kelola, menyulitkan upaya rekonstruksi dan distribusi bantuan (Brookings, 2024; Besaiso, 2024).

Debat akademis tentang rekonstruksi pasca-konflik di Gaza dipengaruhi oleh beberapa teori Hubungan Internasional (HI). Realisme menekankan sifat anarkis sistem internasional dan kepentingan negara, menjelaskan blokade dan fragmentasi politik (Waltz, 1979). Namun, realisme gagal menjelaskan peran aktor non-negara, seperti organisasi keagamaan, dalam diplomasi kemanusiaan dan perdamaian akar rumput (Muhammadiyah, 2024). Liberalisme, dengan fokus pada kerja sama internasional dan keamanan manusia, mendasari banyak intervensi donor di Gaza. Namun, pendekatan "liberal peacebuilding" ini sering dikritik karena mengabaikan konteks lokal dan tidak melibatkan realitas masyarakat terdampak (Tanabe, 2019; Paris, 2004).

Perspektif konstruktivis menyoroti pentingnya nilai, norma, dan jejaring sosial dalam rekonstruksi. Di Gaza, nilai-nilai Islam dan jaringan transnasional, seperti

Muhammadiyah dapat menjadi "pengusung norma" (norm entrepreneurs) yang memperkuat rekonstruksi berbasis komunitas (Finnemore & Sikkink, 1998; Muhammadiyah, 2024). Kritik terhadap "liberal peacebuilding" sangat relevan: model top-down yang dipaksakan dari luar sering kehilangan legitimasi karena mengabaikan aktor, pengetahuan, dan praktik budaya lokal (Tanabe, 2019; Mac Ginty, 2011).

Rencana rekonstruksi terbaru, seperti proposal Liga Arab yang didukung Mesir, mencerminkan kesadaran akan tantangan ini (Al Jazeera, 2025; Politico, 2025). Rencana senilai \$53 miliar, didukung Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan beberapa negara Eropa, menekankan proses bertahap tanpa pemindahan paksa, prioritas pada tenaga kerja lokal, dan struktur pemerintahan teknokratis di bawah Otoritas Palestina (Al Jazeera, 2025; OKI, 2025; Politico, 2025). Aktor internasional menyerukan kepemilikan lokal, keberlanjutan, serta integrasi organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam tata kelola rekonstruksi (Besaiso, 2024; Besaiso, 2025).

Namun, celah penelitian masih besar. Mayoritas studi berfokus pada aktor negara dan LSM Barat, mengabaikan kontribusi unik organisasi Islam Global Selatan seperti Muhammadiyah, yang telah berkontribusi di bidang kesehatan, pendidikan, dan bantuan kemanusiaan di Gaza (Muhammadiyah, 2024; Salaam Gateway, 2024). Selain itu, minim riset yang mengintegrasikan analisis foresight (perencanaan skenario, visi jangka panjang) dengan nilai-nilai Islam dan agensi lokal dalam rekonstruksi pasca-konflik (Besaiso, 2024; Tigran, 2006).

Artikel ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan membingkai ulang rekonstruksi Gaza melalui lensa konstruktivis dan foresight, menekankan peran nilai Islam dan pendekatan berbasis komunitas. Lebih lanjut, artikel ini mengkritik keterbatasan "liberal peacebuilding" dan mengusulkan model "Islamic Sustainable Peace" yang berpusat pada agensi lokal, ketahanan, dan perencanaan jangka panjang. Secara empiris, artikel menganalisis intervensi kemanusiaan Muhammadiyah sebagai prototipe aktor transnasional berbasis keagamaan, dengan pembelajaran dari pengalaman Indonesia di Aceh, di Mindanao, Filipina, pada konflik

Rohingya, dan juga di Pattani, Thailand Selatan. Dengan demikian, studi ini berkontribusi pada debat rekonstruksi pasca-konflik dan menawarkan perspektif Global Selatan untuk perdamaian berkelanjutan di Gaza.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus komparatif untuk menganalisis rekonstruksi pasca-konflik di Gaza melalui lensa konstruktivisme dan foresight, serta peran aktor transnasional berbasis agama seperti Muhammadiyah. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dinamika sosial, nilai, dan norma yang membentuk praktik rekonstruksi, serta untuk mengidentifikasi strategi masa depan yang adaptif dan kontekstual (Bernshausen & Bonacker, 2011; Finnemore & Sikkink, 1998).

1. Kerangka Konstruktivis dan Analisis Sistemik

Penelitian ini mengadopsi perspektif konstruktivis yang menekankan pentingnya nilai, norma, dan jejaring sosial dalam proses transformasi konflik dan rekonstruksi. Pendekatan ini memandang rekonstruksi sebagai proses sosial yang dinamis, di mana makna dan strategi dibentuk melalui interaksi antara aktor lokal, transnasional, dan internasional (Bernshausen & Bonacker, 2011). Sistemik conflict analysis digunakan untuk memetakan hubungan, komunikasi, serta dinamika kekuasaan antara berbagai aktor, termasuk organisasi keagamaan, pemerintah, dan lembaga donor.

2. Integrasi Foresight Analysis

Untuk mengatasi keterbatasan pendekatan konvensional, penelitian ini mengintegrasikan foresight analysis-khususnya scenario planning dan horizon scanning-dalam merumuskan strategi rekonstruksi jangka panjang. Foresight dipahami sebagai proses sosial dan intervensi organisasi yang bertujuan mengidentifikasi tren, ketidakpastian, serta kemungkinan masa depan dalam konteks sosial-politik Gaza (Öner, 2010; Acevska & Tulgar, 2020; DANIEL & DITRYCH, 2024). Proses foresight dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap utama:

- Horizon scanning: mengidentifikasi isu-isu kunci, aktor, dan tren global serta regional yang memengaruhi Gaza,
- Penyusunan skenario: mengembangkan narasi masa depan berdasarkan kombinasi variabel politik, ekonomi, sosial, dan budaya,
- Strategic probing: mengevaluasi respons dan strategi adaptif dari aktor lokal, termasuk Muhammadiyah, terhadap kemungkinan skenario masa depan (DANIEL & DITRYCH, 2024).

3. Studi Kasus dan Komparasi

Studi kasus ini berfokus pada analisis kekuatan dan kelemahan Deklarasi Mesir 2025 untuk rekonstruksi Gaza, dengan membandingkannya terhadap Oslo Accords serta upaya rekonstruksi pada tahun 2008, 2012, dan 2014. Analisis dilakukan secara mendalam melalui studi literatur, telaah dokumen resmi, laporan lembaga internasional, dan publikasi akademik (Besaiso, 2024; Latief & Nashir, 2020). Pendekatan ini memungkinkan triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan (Strauss & Corbin, 1998; Tigran, 2006).

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola utama dalam narasi rekonstruksi, peran aktor, serta strategi masa depan. Pendekatan ini memadukan analisis kualitatif berbasis konstruktivisme dengan pemetaan skenario foresight untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan berkelanjutan (Bernshausen & Bonacker, 2011; Mac Ginty, 2011).

5. Validasi dan Refleksi Kritis

Untuk memastikan kredibilitas, validasi dilakukan melalui diskusi pakar, review literatur internasional, dan refleksi kritis atas bias peneliti. Penelitian ini juga mengadopsi prinsip-prinsip partisipatoris, dengan melibatkan aktor lokal dalam proses refleksi dan pengujian relevansi hasil analisis (O'Driscoll, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deklarasi Mesir untuk Rekonstruksi Gaza

Deklarasi Mesir 2025 muncul sebagai proposal rekonstruksi paling ambisius pasca-konflik Gaza, mendapat dukungan luas dari Liga Arab, sejumlah negara Eropa, dan

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) (Al Jazeera, 2025; Asem, 2025; Shamala & Sio, 2025). Rencana ini membagi proses rekonstruksi menjadi tiga tahap utama selama lima tahun dengan total anggaran sekitar US\$53 miliar (Shamala & Sio, 2025; Le Monde, 2025). Pada tahap awal selama enam bulan, fokus utamanya adalah pembersihan puing-puing, penanganan bahan peledak yang belum meledak, dan penyediaan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal (Al Jazeera, 2025; Omar, 2025). Tahap kedua, yang berlangsung dua tahun, memprioritaskan pembangunan 200.000 unit rumah baru serta pemulihan layanan dasar seperti air bersih, listrik, dan fasilitas umum (Shamala & Sio, 2025; Le Monde, 2025). Tahap ketiga, selama dua setengah tahun, diarahkan pada pengembangan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur penting seperti pelabuhan, kawasan industri, bandara, dan fasilitas publik lainnya (Asem, 2025; Al Jazeera, 2025).

Deklarasi Mesir memiliki beberapa kekuatan utama. Pertama, proposal ini secara tegas menolak segala bentuk pemindahan paksa penduduk Gaza, menegaskan prinsip non-displacement dan hak warga Gaza untuk tetap tinggal di tanah mereka sendiri (Al Jazeera, 2025; Omar, 2025; Asem, 2025). Kedua, rencana ini memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja lokal dan pelaku usaha setempat di setiap tahap rekonstruksi, serta mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam desain pembangunan (Shamala & Sio, 2025; Ahram Online, 2025). Ketiga, deklarasi ini mengusulkan pembentukan komite teknokrat non-partisan untuk memimpin proses transisi sebelum Otoritas Palestina mengambil alih sepenuhnya (Al Jazeera, 2025; Asem, 2025). Keempat, proposal ini telah memperoleh legitimasi kuat di tingkat regional dan internasional serta membuka peluang penyelenggaraan konferensi donor besar (Le Monde, 2025; Omar, 2025). Kelima, terdapat penekanan kuat pada kepemilikan lokal dan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam tata kelola rekonstruksi (DAWN, 2025).

Namun demikian, Deklarasi Mesir juga memiliki sejumlah kelemahan. Pertama, meskipun komprehensif, rencana ini masih bersifat deklaratif dan minim detail teknis operasional, terutama terkait masa depan Hamas, mekanisme pendanaan konkret, serta

tata kelola keamanan selama proses rekonstruksi (Omar, 2025; DAWN, 2025; The New Arab, 2025). Kedua, proposal ini belum menawarkan solusi jelas terhadap fragmentasi politik internal Palestina, sementara risiko veto dari Israel yang secara konsisten menolak keterlibatan baik Hamas maupun Otoritas Palestina tetap menjadi ancaman serius (Asem, 2025; Omar, 2025). Ketiga, proses perumusan yang terkesan terburu-buru membuatnya membutuhkan revisi teknis lebih lanjut sebelum dapat diimplementasikan secara efektif (Palestine Chronicle, 2025). Keempat, terdapat potensi politisasi dan perebutan pengaruh di antara aktor regional dan donor yang terlibat (Hamzawy, 2025).

Komparasi dengan Oslo Accords dan Upaya 2008, 2012, 2014

Oslo Accords yang ditandatangani pada 1993 pernah menjadi tonggak penting dengan janji solusi dua negara, pengakuan timbal balik, dan rencana transisi lima tahun menuju penyelesaian permanen (Miller, 2023; Al-Kassim, 2023). Namun, kegagalan implementasi, kaburnya status final, lemahnya mekanisme jaminan, dan kurangnya kepercayaan di antara para pemimpin menyebabkan Oslo gagal mencegah siklus kekerasan berulang dan tidak berhasil memperkuat institusi lokal Palestina (BESA Center, 2008; My Jewish Learning, 2023). Oslo juga dinilai terlalu fokus pada reformasi internal Palestina dan mengabaikan akar konflik, sehingga justru memperkuat status quo pendudukan (Al-Kassim, 2023).

Sementara itu, upaya rekonstruksi pasca-konflik pada 2008, 2012, dan 2014 lebih didominasi oleh Gaza Reconstruction Mechanism (GRM), sebuah kesepakatan sementara antara Pemerintah Palestina dan Israel yang difasilitasi oleh PBB (ReliefWeb, 2014). GRM pada praktiknya memberikan kontrol penuh kepada Israel atas masuknya material konstruksi, pemilihan vendor, dan penetapan penerima bantuan. Proses persetujuan yang berbelit-belit (rata-rata waktu tunggu 207 hari per proyek), birokrasi rumit, serta ketergantungan mutlak pada persetujuan Israel memperparah penderitaan warga Gaza dan menunda pemulihan (ReliefWeb, 2014; DAWN, 2025). GRM juga memperkuat blokade yang ada dan mengurangi kedaulatan serta partisipasi aktor lokal dalam proses rekonstruksi (DAWN, 2025).

Dibandingkan pendekatan sebelumnya, Deklarasi Mesir 2025 menawarkan keunggulan signifikan: lebih tegas menolak pemindahan paksa, menekankan kepemilikan lokal, lebih ambisius dalam skala dan inklusivitas, serta membuka ruang partisipasi masyarakat sipil dan sektor swasta (Al Jazeera, 2025; Asem, 2025; Omar, 2025). Namun, kelemahan mendasar seperti fragmentasi politik internal Palestina, ketidakjelasan mekanisme pendanaan dan tata kelola keamanan, serta potensi politisasi eksternal masih menjadi tantangan utama (DAWN, 2025; Hamzawy, 2025).

Tabel 1. Perbandingan Pendekatan Rekonstruksi Gaza

Aspek	Deklarasi Mesir (2025)	Oslo Accords (1993)	Upaya 2008, 2012, 2014 (GRM)
Prinsip Utama	Non-displacement, kepemilikan lokal, komite teknokrat	Solusi dua negara, pengakuan timbal balik	Kontrol penuh Israel atas material dan vendor
Kekuatan	Dukungan regional, masyarakat sipil, inklusivitas	Kerangka solusi politik awal	Pengawasan material masuk
Kelemahan	Minim detail teknis, fragmentasi politik, risiko veto Israel	Lemah implementasi, status final kabur, gagal atasi akar konflik	Proses lambat, birokrasi berat, memperkuat blockade
Dampak pada Masyarakat	Potensi partisipasi lokal meningkat, risiko politisasi	Kekecewaan, status quo berlanjut	Keterlambatan pemulihan, ketergantungan
Peluang Kolaborasi	Terbuka untuk masyarakat sipil dan	Terbatas pada aktor negara	Sangat terbatas untuk NGO

	NGO		
--	-----	--	--

Tantangan Kunci Deklarasi Mesir: Analisis Foresight

Pendekatan foresight digunakan untuk memetakan tantangan utama, kekuatan pendorong masa depan, serta kemungkinan skenario dan jalur menuju perdamaian berkelanjutan di Gaza pasca-Deklarasi Mesir 2025. Metode foresight ini menekankan identifikasi ketidakpastian strategis, pemetaan aktor dan tren utama, serta pengembangan skenario masa depan berbasis dinamika politik, ekonomi, dan keamanan (Aboudouh, 2025; Omar, 2025).

Tantangan Utama Deklarasi Mesir

Kebuntuan politik dan krisis tata kelola menjadi tantangan utama yang dihadapi Deklarasi Mesir. Rivalitas antara Hamas dan Otoritas Palestina (PA) terus menjadi hambatan signifikan, di mana Hamas secara konsisten menolak pemerintahan PA sementara Israel menolak kedua entitas tersebut untuk memerintah Gaza (Toameh, 2021; MP-IDSA, 2025). Legitimasi PA juga berada dalam ancaman serius jika dianggap akan kembali ke Gaza di bawah tekanan Israel (Graham, 2025).

Penolakan Israel dan risiko keamanan juga menjadi tantangan besar. Israel terus menuntut perlucutan senjata Hamas sementara menolak pemerintahan PA di Gaza, sedangkan Hamas sendiri menolak untuk melepaskan senjata tanpa adanya jaminan politik yang jelas (Aboudouh, 2025; Omar, 2025). Operasi militer Israel yang terus berlanjut berpotensi besar untuk menghambat proses rekonstruksi dan semakin memperparah kerentanan keamanan di wilayah tersebut (Shamala & Sio, 2025).

Di bidang ekonomi dan kemanusiaan, ketidakpastian masih menyelimuti rencana rekonstruksi. Kesenjangan pendanaan untuk mencapai target US\$53 miliar masih menjadi tanda tanya besar, dengan komitmen dari donor internasional yang belum pasti serta risiko ketergantungan berkelanjutan pada bantuan asing (Omar, 2025; Ebrahim, 2025). Blokade Israel yang terus berlangsung juga dapat membatasi secara signifikan aktivitas perdagangan, mobilitas penduduk, dan pemulihan ekonomi Gaza secara keseluruhan (Asem, 2025).

Ambiguitas kebijakan Amerika Serikat menambah kompleksitas situasi. Rencana Mesir harus bersaing dengan proposal "Middle East Riviera" era Trump yang mendorong relokasi penduduk Gaza (Haltiwanger, 2025). Dukungan AS yang fluktuatif dapat berubah sewaktu-waktu jika Israel menunjukkan penentangan yang kuat terhadap rencana Mesir (Aboudouh, 2025).

Kekuatan Pendorong Masa Depan (Key Forces)

Dalam aspek politik dan keamanan, proses perdamaian yang mandek, berbagai pembatasan dari Israel, persaingan antara Hamas-PA, serta peran aktor internasional seperti PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa, negara-negara Arab, dan Tiongkok akan menjadi faktor penentu stabilitas jangka panjang di Gaza (Aboudouh, 2025; Haltiwanger, 2025).

Di bidang ekonomi dan kemanusiaan, kerusakan infrastruktur yang masif, tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan ekstrem, tekanan berat pada sistem kesehatan, dan ketergantungan yang besar pada bantuan internasional menjadi tantangan utama yang harus diatasi (Omar, 2025; Shamala & Sio, 2025).

Skenario Masa Depan Gaza

Skenario pertama yang optimis menggambarkan tercapainya perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Dalam skenario ini, kesepakatan politik berhasil dicapai, tata kelola yang stabil terbentuk, rekonstruksi infrastruktur dan ekonomi berjalan dengan baik, serta blokade akhirnya dicabut. Gaza kemudian berkembang menuju kemandirian ekonomi dan integrasi regional yang lebih baik.

Skenario kedua yang pesimis memprediksikan konflik siklis dan stagnasi berkelanjutan. Kekerasan terus berulang tanpa penyelesaian, kebuntuan politik berkepanjangan, dan Gaza tetap terisolasi serta sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan. Proses rekonstruksi berjalan sangat lambat sementara ketidakstabilan sosial dan ekonomi terus berlanjut.

Skenario ketiga yang berada di tengah-tengah menggambarkan stabilitas parsial dan pembangunan terbatas. Rekonstruksi hanya terjadi di sektor-sektor tertentu tanpa penyelesaian politik yang menyeluruh. Gencatan senjata yang rapuh tetap

dipertahankan, masa depan masih belum pasti, dan kemajuan ekonomi hanya terbatas pada area-area tertentu.

Jalur Menuju Perdamaian Berkelanjutan (Pathways)

Rekonstruksi inklusif menjadi salah satu jalur penting dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pengembangan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan melalui kolaborasi internasional dan tata kelola lokal yang kuat.

Pencapaian kemandirian ekonomi juga menjadi krusial melalui penciptaan lapangan kerja yang luas, dukungan terhadap wirausaha lokal, serta pembukaan koridor perdagangan untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan asing.

Penyembuhan sosial dan psikologis masyarakat tidak kalah pentingnya melalui program pemulihan trauma, reformasi sistem pendidikan, dan berbagai inisiatif peacebuilding untuk memperkuat ketahanan masyarakat.

Pemanfaatan teknologi cerdas dan solusi lingkungan juga menjadi pendekatan inovatif dengan memanfaatkan AI untuk pemantauan konflik, pelacakan progress rekonstruksi, serta pengembangan energi surya, sistem desalinasi air, dan infrastruktur pintar untuk menjamin ketahanan air dan energi di Gaza.

Peran Krusial Akademisi dan Lembaga Riset dalam Rekonstruksi Gaza

Universitas dan lembaga riset memegang peran strategis yang multidimensional dalam proses rekonstruksi Gaza pasca-konflik. Institusi akademik tidak hanya berfungsi sebagai pusat penelitian untuk resolusi konflik dan perencanaan tata kota yang berkelanjutan, tetapi juga berperan aktif dalam membangun jaringan pertukaran pendidikan internasional, mengembangkan program kepemimpinan transformasional, serta merancang inovasi digital untuk mendukung tata kelola dan proses rekonstruksi (Hamad, 2024).

Pengalaman global menunjukkan bahwa universitas dapat mengembangkan sistem peringatan dini konflik yang canggih, mendirikan pusat-pusat riset resolusi konflik khusus, serta merancang program pelatihan perdamaian yang inklusif dengan melibatkan berbagai aktor lokal, termasuk kelompok perempuan dan generasi muda. Lebih dari itu, universitas memiliki kapasitas untuk

menyelenggarakan pelatihan negosiasi tingkat lanjut, program penanggulangan ujaran kebencian, serta membangun kemitraan strategis dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat upaya rekonsiliasi jangka panjang (Hamad, 2024).

Di era digital ini, inovasi teknologi menjadi kunci penting dalam percepatan rekonstruksi. Universitas dan think tank memiliki kemampuan untuk mengembangkan solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memantau distribusi bantuan kemanusiaan, menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data empiris, serta merancang kerangka kerja pembangunan berkelanjutan khusus untuk wilayah pasca-konflik seperti Gaza (Hamad, 2024). Berbagai studi kasus internasional membuktikan bahwa keterlibatan aktif universitas dalam peacebuilding dapat secara signifikan mempercepat proses reintegrasi sosial, memperkuat tata kelola lokal, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara adil dan berkelanjutan.

Kontribusi Vital Organisasi Masyarakat Sipil (CSO)

Organisasi masyarakat sipil (CSO) memainkan peran yang tidak tergantikan dalam berbagai aspek rekonstruksi Gaza. Mereka aktif dalam pemantauan hak asasi manusia, advokasi kebijakan, serta pendokumentasian sistematis berbagai pelanggaran yang terjadi selama konflik (Igbo, 2019). CSO juga berperan penting dalam diplomasi internasional, membangun dialog akar rumput yang konstruktif, serta menjadi mediator konflik di tingkat komunitas.

Program-program pendampingan psikososial seperti kesehatan mental dan trauma healing menjadi kontribusi khas CSO, bersama dengan pelatihan vokasi yang dirancang khusus untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Gaza. Di bidang ekonomi, CSO memberikan kontribusi nyata melalui berbagai program pengembangan ekonomi mikro, termasuk pembiayaan mikro (microfinance), pelatihan kewirausahaan terpadu, dan dukungan teknis untuk pengembangan usaha sosial. Berbagai inisiatif ini telah terbukti efektif dalam mempercepat pemulihan ekonomi di berbagai wilayah pasca-konflik di dunia (Igbo, 2019).

Kontribusi Nyata dan Potensial Muhammadiyah beserta Jaringan Universitasnya

Intervensi Jangka Pendek (1-3 Tahun): Respons Kemanusiaan Terpadu

Muhammadiyah melalui Lazismu dan MDMC telah membuktikan komitmennya dengan menyalurkan berbagai bentuk bantuan kemanusiaan ke Gaza, termasuk layanan medis darurat, bantuan pangan pokok, penyediaan tempat tinggal sementara, serta program trauma healing dan klinik keliling. Keunggulan kompetitif Muhammadiyah terletak pada jaringan relawan yang luas dan terlatih, serta kemampuan akses langsung ke zona konflik, yang memungkinkan distribusi bantuan dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan efektif.

Program Jangka Menengah (3-7 Tahun): Investasi Pendidikan dan Ekonomi Berkelanjutan

Muhammadiyah dan jaringan universitasnya menyediakan beasiswa penuh bagi mahasiswa Palestina di berbagai bidang strategis seperti kedokteran, teknik, dan administrasi pemerintahan. Selain itu, mereka mengembangkan program pelatihan vokasi teknis yang khusus dirancang untuk mendukung rekonstruksi infrastruktur Gaza. Fokus pengembangan juga diberikan pada sektor kewirausahaan dan industri halal, dengan memanfaatkan pengalaman panjang Muhammadiyah dalam pemberdayaan ekonomi komunitas melalui model bisnis berbasis kemitraan dan penguatan UMKM. Program-program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu warga Gaza, tetapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang mandiri dan mengurangi ketergantungan pada bantuan luar negeri.

Visi Jangka Panjang (7+ Tahun): Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola

Dalam perspektif jangka panjang, Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk mendukung rekonstruksi rumah sakit dan fasilitas kesehatan, pengembangan sistem telemedicine, serta inisiatif kesehatan digital yang terintegrasi. Selain itu, Muhammadiyah dapat berkontribusi melalui program pelatihan kebijakan publik dan peacebuilding untuk calon pemimpin muda Palestina. Universitas Muhammadiyah dapat berperan sebagai mitra strategis dalam penelitian kebijakan, pengembangan kurikulum perdamaian, serta

transfer teknologi untuk mendukung tata kelola dan pembangunan berkelanjutan di Gaza.

Tabel 2. Sintesis Kontribusi Muhammadiyah dan Universitasnya

Rentang Waktu	Fokus Kontribusi	Implementasi Nyata
Jangka Pendek (1-3 tahun)	Tanggap Darurat Kemanusiaan	Penyediaan layanan medis darurat, program trauma healing, klinik keliling, bantuan pangan dan tempat tinggal melalui Lazismu dan MDMC
Jangka Menengah (3-7 tahun)	Pengembangan SDM dan Ekonomi	Beasiswa pendidikan tinggi, pelatihan vokasi teknis, pendampingan wirausaha dan pengembangan industri halal
Jangka Panjang (7+ tahun)	Penguatan Kelembagaan	Rehabilitasi fasilitas kesehatan, pengembangan sistem telemedicine, pendidikan kepemimpinan dan peacebuilding, penelitian kebijakan

4. KESIMPULAN

Studi ini menyoroti kompleksitas rekonstruksi pasca-konflik di Gaza, yang hingga kini masih terjebak dalam siklus kehancuran, fragmentasi politik, dan ketergantungan pada bantuan eksternal. Melalui pendekatan foresight dan lensa konstruktivisme, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi Deklarasi Mesir 2025-mulai dari kebuntuan politik antara Hamas dan Otoritas Palestina, penolakan Israel, ketidakpastian

pendanaan, hingga risiko politisasi oleh aktor eksternal. Meski lebih inklusif dan ambisius dibanding Oslo Accords maupun mekanisme rekonstruksi sebelumnya (GRM 2008, 2012, 2014), Deklarasi Mesir tetap belum mampu mengatasi akar permasalahan, terutama fragmentasi politik internal dan ketidakjelasan tata kelola keamanan serta pendanaan (Al Jazeera, 2025; Omar, 2025; Asem, 2025).

Analisis foresight menunjukkan bahwa masa depan Gaza sangat dipengaruhi oleh kekuatan pendorong politik, keamanan, ekonomi, dan kemanusiaan. Tiga skenario utama yang mungkin terjadi adalah: (1) perdamaian dan pembangunan berkelanjutan dengan tata kelola stabil dan rekonstruksi menyeluruh, (2) konflik siklis dan stagnasi akibat kebuntuan politik dan blokade berkelanjutan, serta (3) stabilitas parsial dengan pembangunan terbatas di tengah gencatan senjata rapuh (Aboudouh, 2025; Omar, 2025).

Metodologi studi kasus komparatif memperlihatkan bahwa keterlibatan aktor non-negara, khususnya Muhammadiyah dan jaringan universitasnya, menawarkan peluang strategis untuk mengisi kelemahan rekonstruksi konvensional. Muhammadiyah telah membuktikan kapasitasnya dalam bantuan kemanusiaan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga pengembangan institusi kesehatan dan telemedicine di Gaza. Dalam jangka pendek, kontribusi Muhammadiyah meliputi bantuan medis, trauma healing, dan distribusi pangan. Dalam jangka menengah, peran Muhammadiyah dan universitasnya berfokus pada beasiswa, pelatihan vokasi, dan pemberdayaan ekonomi. Sedangkan dalam jangka panjang, Muhammadiyah dapat mendukung penguatan institusi publik, riset kebijakan, dan pelatihan peacebuilding untuk pemimpin muda Palestina (Muhammadiyah, 2024; Hamad, 2024).

Kesimpulannya, rekonstruksi Gaza yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan multidimensi yang menggabungkan tata kelola inklusif, kemandirian ekonomi, inovasi teknologi, dan penyembuhan sosial. Peran Muhammadiyah sebagai aktor transnasional berbasis nilai dan pengetahuan menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan komunitas dan memastikan proses rekonstruksi tidak hanya reaktif, tetapi juga visioner dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan foresight,

rekonstruksi Gaza dapat diarahkan menuju perdamaian yang lebih tahan lama, adil, dan berkelanjutan di tengah dinamika politik dan keamanan yang terus berubah (Aboudouh, 2025; Omar, 2025; Muhammadiyah, 2024).

DAFTAR PUSTAKA

- Aboudouh, A. (2025, March 7). Egypt's plan for Gaza may have thwarted Trump's 'riviera' for now – but its loopholes need to be fixed. <https://www.chathamhouse.org/2025/03/egypts-plan-gaza-may-have-thwarted-trumps-riviera-now-its-loopholes-need-be-fixed>
- Acevska, NI., & Tulgar, BG. (2020). Foresight and scenario planning methodologies. <https://www.cef-see.org/2020-foresight>
- Ahram Online. (2025, April 5). Explainer: Everything you need to know about Egypt's Gaza reconstruction plan. <https://english.ahram.org.eg/NewsContent/1/1234/541424/Egypt/Foreign-Affairs/Explainer-Everything-you-need-to-know-about-Egypt.aspx>
- Al Jazeera. (2025, March 4). What is Egypt's plan for the reconstruction of Gaza? <https://www.aljazeera.com/news/2025/3/4/what-is-egypts-plan-for-the-reconstruction-of-gaza>
- Al-Kassim, Mohammad. (2023, September 18). 30 years later, Oslo's failures haunt both sides. <https://themedialine.org/top-stories/30-years-later-oslo-failures-haunt-both-sides/>
- Asem, Sondos. (2025, March 5). What is Egypt's \$53bn plan for Gaza reconstruction? <https://www.middleeasteye.net/news/what-egypts-plan-gaza-reconstruction>
- BBC Indonesia. (2023, October 13). 'Hamas bukan pemerintah Palestina' – Apa kata kubu Mahmoud Abbas?
- Bernshausen, S., & Bonacker, T. (2011). A constructivist perspective on systemic conflict transformation. Berghof Foundation. https://berghof-foundation.org/files/publications/sct_book_2011_Bernshausen.pdf
- Besaiso, Mamoun. (2024). Reconstruction governance – Lessons learned: Palestinian perspectives on the reconstruction of Gaza. Friedrich-Ebert-Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/amman/20570.pdf>
- Besaiso, Mamoun. (2025, April 7). Postwar-Gaza plans cannot exclude Palestinians. <https://www.passblue.com/2025/04/07/postwar-gaza-plans-cannot-exclude-palestinians/>
- Dahl, Jordyn. (2025, March 9). France, Germany, Italy and UK back Gaza reconstruction plan. <https://www.politico.eu/article/eu-foreign-ministers-back-gaza-reconstruction-plan/>
- Daniel, Jan., & Ditych, Ondrej. (2024). Foresight in a state of war and geopolitical tensions: Scenario-building methodology. <https://re-engaging.eu/foresight-in-a-state-of-war-and-geopolitical-tensions-scenario-building-methodology/>
- DAWN. (2025, March 4). UN Security Council: Endorse Arab League Gaza Reconstruction Plan. <https://dawnmena.org/un-security-council-endorse-arab-league-gaza-reconstruction-plan/>
- Ebrahim, Hudhaifa. (2025, March 10). Saudi analyst tells TML Egypt's \$53 billion Gaza reconstruction plan may face major obstacles. <https://themedialine.org/top-stories/saudi-analyst-tells-tml-egypts-53-billion-gaza-reconstruction-plan-may-face-major-obstacles/>
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International norm dynamics and political change. *International Organization*, 52(4), 887–917. <https://doi.org/10.1162/002081898550789>
- Graham, E. (2025, March 6). 'Obstacles' in Egypt's \$53 billion plan to rebuild Gaza, install Palestinian Authority control. <https://www.cnbc.com/2025/03/06/obstacles-in-egypts-53-billion-plan-to-rebuild-gaza-install-palestinian-authority-control.html>
- Haltiwanger, J. (2025, March 6). Who will rule over Gaza after the war?

- <https://foreignpolicy.com/2025/03/06/gaza-war-reconstruction-plans-trump-egypt-arab-lapid/>
- Hamad. B. (2024, March 5). The role of universities in fostering peace in communities: The case of Red Sea University in Sudan. <https://kujenga-amani.ssrc.org/2024/03/05/the-role-of-universities-in-fostering-peace-in-communities-the-case-of-red-sea-university-in-sudan/>
- Hamzawy, Amr. (2025, March 6). The Arab States' remarkable moves to push peace in Gaza. <https://carnegieendowment.org/emissary/2025/03/gaza-ceasefire-egypt-reconstruction-palestine-summit>
- Igbo, MC. (2019). Role of civil society organisations in post conflict peace building. *Social Science Journal*, 16(2), 195–216. <https://journals.aphriapub.com/index.php/SS/article/download/1071/1031/2101>
- Khazen, I., Semerci, A., & Cebi, GN. (2025, March 8). Muslim group rejects forced displacement of Palestinians, backs Gaza reconstruction plan. *Shamala & Sio*. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/muslim-group-rejects-forced-displacement-of-palestinians-backs-gaza-reconstruction-plan/3503585>
- Latief, H., & Nashir, H. (2020). The case of Muhammadiyah: From charity to humanitarianism. *Journal of Asian and African Studies*, 55(3), 299–313. <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1868103420910514>
- Le Monde. (2025, March 4). Egypt unveils \$53 billion plan to rebuild Gaza as alternative to Trump's. https://www.lemonde.fr/en/international/article/2025/03/04/egypt-proposes-53-billion-plan-to-rebuild-gaza_6738815_4.html
- Mac Ginty, R. (2011). *International peacebuilding and local resistance: Hybrid forms of peace*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9780230307032>
- Miller, AD. (2023, September 13). Why the Oslo Peace Process failed. <https://foreignpolicy.com/2023/09/13/oslo-accords-1993-anniversary-israel-palestine-peace-process-lessons/>
- Muhammadiyah. (2023, October 27). Muhammadiyah's Gaza aid initiative: Providing relief amidst tragedy. <https://en.muhammadiyah.or.id/muhammadiyahs-gaza-aid-initiative-providing-relief-amidst-tragedy/>
- Muhammadiyah. (2024, April 29). Muhammadiyah and Lazismu provide life-saving aid to Gaza in collaboration with POROZ. <https://en.muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-and-lazismu-provide-life-saving-aid-to-gaza-in-collaboration-with-poroz/>
- Muhammadiyah. (2024, September 29). Muhammadiyah scholarship for Palestinian students (Fully funded) batch III. <https://en.muhammadiyah.or.id/muhammadiyah-scholarship-for-palestinian-students-fully-funded-batch-iii/>
- Muhammadiyah. (2024). Muhammadiyah's internationalization and global humanitarian missions. <https://en.muhammadiyah.or.id/muhammadiyahs-internationalization-and-global-humanitarian-missions/>
- O'Driscoll, D. (2019). GOV.UK. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c6bdb23ed915d4a343cb9dd/494_Good_Practice_in_Post-Conflict_Reconstruction.pdf
- Qarmout, T., & Béland, D. (2012). The politics of international aid to the Gaza Strip. *Journal of Palestine Studies*, 41(4), 32–47.
- Omar, Rafik. (2025, March 10). What does Egypt's plan to rebuild Gaza involve and what challenges does it face? <https://theconversation.com/what-does-egypts-plan-to-rebuild-gaza-involve-and-what-challenges-does-it-face-251567>
- Paris, R. (2004). *At war's end: Building peace after civil conflict*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511790836>

- ReliefWeb. (2014, September 16). Gaza Reconstruction Mechanism - Fact Sheet. <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gaza-reconstruction-mechanism-fact-sheet>
- Salaam Gateway. (2024). What will reconstructing besieged Gaza entail? <https://salaamgateway.com/insights/what-will-reconstructing-besieged-gaza-entail>
- Shaban, Omar. (2025). Gaza's day after: Reconstruction and governance challenges. <https://www.brookings.edu/research/gazas-day-after-reconstruction-and-governance-challenges/>
- Shamala, AR., & Sio, M. (2025, March 5). FACT BOX - Key features of Egypt's Gaza reconstruction plan. <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/fact-box-key-features-of-egypt-s-gaza-reconstruction-plan/3500342>
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage.
- Tanabe, K. (2019). Beyond liberal peace: Critique of liberal peacebuilding and the creation of hybrid forms of peace. *Southeast European and Black Sea Studies*, 19(1), 27–43. <https://doi.org/10.1080/14683857.2019.1571831>
- The New Arab. (2025, February 20). Exclusive: Egypt Gaza plan faces Arab split over reconstruction. <https://www.newarab.com/news/exclusive-egypt-gaza-plan-faces-arab-split-over-reconstruction>
- Tigran, Hasic. (2006). Reconstruction planning in post-conflict zones. <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:14256/FULLTEXT02.pdf>
- Toameh, KA. (2021, June 27). Hamas: PA obstructing Gaza reconstruction. <https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/hamas-pa-obstructing-gaza-reconstruction-672094>
- United Nations Office for Project Services. (2024). Supporting the Gaza Reconstruction Mechanism: Working together to rebuild after conflict. <https://www.unops.org/news-and-stories/news/supporting-the-gaza-reconstruction-mechanism-working-together-to-rebuild-after-conflict>
- Waltz, K. (1979). Theory of international politics. Addison-Wesley.

